

## Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020-2023

### 1. Pencapaian Kapasitas

KAPASITAS	2020	2021	2022	2023
Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3
Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Level 0	Level 0	Level 3	Level 3
Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Level 0	Level 0	Level 3	Level 3
Indeks MCP	88%	91,69%	93%	90 %
LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
TLHP BPK	84%	79%	76,76%	80%
TLHP ITJEN	100%	100%	100%	100%
TLHP Inspektorat	79%	79%	79%	90%
Pelayanan Pengaduan Masyarakat		77,8%	80%	83%
Pencapaian Stranas PK		35	83,5	83,5%
Pencegahan Korupsi		100%	100%	100%
Penjaminan Kualitas		341	321	361
Pembangunan ZI menuju WBK & WBBM	-	-	Pencanangan dilakukan pada 2 Februari 2022	Belum masuk penilaian nasional

## 2. Budaya Kerja



## 3. Inovasi Pengembangan

Inovasi Pengembangan Tahun Anggaran 2020-2023	
<b>I. TAHUN ANGGARAN 2020</b>	
1.	Optimalisasi sinergitas dan kemitraan pengawasan;
2.	Penyeimbangan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan perbandingan 40:60
3.	Melaksanakan SDM Terpilih
4.	Pembinaan dan pengawasan berbasis resiko
5.	Penyusunan pedoman teknis pembinaan
6.	Penganekaragaman audit (kinerja, kepatuhan, probity dan forensik)
7.	Melaksanakan pendampingan kepada OPD (pengelolaan anggaran COVID-19)
<b>II. TAHUN ANGGARAN 2021</b>	
1.	Optimalisasi sinergitas dan kemitraan pengawasan;

## Inovasi Pengembangan Tahun Anggaran 2020-2023

2. Penyeimbangan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan dengan perbandingan 40:60;
3. Melaksanakan pemilihan Tim Pemeriksa terbaik;
4. Melaksanakan pemilihan PNS berkinerja terbaik;
5. Melaksanakan pemilihan PNS Teladan;
6. Pembinaan dan pengawasan berbasis resiko;
7. Penyusunan pedoman teknis pembinaan;
8. Penyusunan pedoman teknis pengawasan;
9. Penganekaragaman audit (kinerja, kepatuhan, probity dan penghitungan kerugian keuangan negara);
10. Melaksanakan pendampingan pada OPD;
11. Menyusun tugas dan fungsi sesuai dengan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai bentuk surat dari Gubernur dan surat dari Inspektur;
13. Menyusun Pergub No 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
14. Pelayanan konsultasi
15. Memulai pengawasan Dana BOS.

## III. TAHUN ANGGARAN 2022

1. Optimalisasi sinergitas dan kemitraan pengawasan
2. Penyeimbangan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan dengan perbandingan 40:60;
3. Melaksanakan pemilihan Tim Pemeriksa terbaik
4. Melaksanakan pemilihan PNS Pekerja Keras;
5. Melaksanakan pemilihan PNS Teladan;
6. Pembinaan dan pengawasan berbasis resiko;
7. Penyusunan pedoman teknis pembinaan;
8. Penyusunan pedoman teknis pengawasan;
9. Melaksanakan pendampingan pada Perangkat Daerah;
10. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai bentuk surat dari Gubernur dan surat Inspektur;

## Inovasi Pengembangan Tahun Anggaran 2020-2023

11. Menyusun Pergub No 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (Whistle Blowing system) Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. Pelayanan konsultasi;
13. Pemberian kartu selamat ulang tahun kepada PNS yang berulang tahun;
14. Pemberian piagam selamat ulang tahun pernikahan kepada PNS yang berulang tahun pernikahan ke 15, ke 20 dan ke 25;
15. Memulai pengawasan Dana BOS.

### IV. TAHUN ANGGARAN 2023

1. PKS bersertifikat
2. Pemilihan Pegawai Terbaik Panutan (PETERPAN)
3. Pengawasan
  - a. Perluasan jangkauan pengawasan ke Puskesmas, SD dan SMP;
  - b. Perluasan evaluasi indikator GG dan CG;
  - c. Pemeriksaan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas di PD dan Kab/Kota;
  - d. Kunjungan kerja tidak terjadwal.
4. Pembinaan
  - a. Pembinaan langsung ke Kab/Kota dan PD;
  - b. Pembekalan terhadap seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
  - c. Dukungan terhadap optimalisasi penerimaan retribusi daerah.